

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui dan menganalisis rumusan dalam peraturan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban pelaku terkait pengolahan minyak bumi tanpa izin. 2. Untuk mengetahui pentingnya kebijakan hukum pidana terkait pengolahan minyak bumi tanpa izin agar pelaku tindak pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin merasakan efek jera terkait perbuatannya. Metode penelitian di sini penulis menggunakan tipe yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan kasus (*Cases Approach*), pendekatan sejarah (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Adapun rumusan masalah dalam dalam penulisan ini diantaranya, 1. Bagaimana rumusan pengaturan tindak pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin serta pertanggungjawaban pidana? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin? Perubahan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi khususnya dalam ketentuan pidana minyak bumi ini akan membuat dampak yang sangat buruk bagi negara maupun masyarakat banyak yang tidak merasakan dari hasil pengolahan tersebut yang dimana jika dibiarkan pengolahan minyak dilakukan secara illegal maka negara tidak akan mendapatkan keuntungan untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dengan bertambahnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara maka dari dana tersebut dapat disalurkan keseluruh daerah atau ke masyarakat-masyarakat yang tidak mampu dapat diberikan bantuan dengan anggaran tersebut, jika dikelola oleh salah satu individu atau kelompok maka yang menikmati hasil dari pengolahan minyak bumi tersebut hanya individu atau kelompok itu sendiri, selain itu juga berdampak kepada masyarakat yang menggunakan minyak hasil olahan yang tidak sesuai standar maka akan dapat menimbulkan kerusakan pada kendaraan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Kepastian Hukum,*

ABSTRACT

This study aims 1. To find out and analyze the formulation in laws and regulations, as well as the responsibilities of actors related to oil processing without a permit from the perspective of laws and regulations in Indonesia. 2. To find out the importance of criminal law policies related to oil processing without a permit so that the perpetrators of the crime of oil processing without a permit feel a deterrent effect regarding their actions. The research method here uses a normative juridical type through statutory approach (Statue Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), case approach (Cases Approach), historical approach (Historical Approach), comparative approach (Comparative Approach). The formulation of the problem in this writing includes, 1. What is the formula for regulating the crime of processing petroleum without a permit and criminal liability? 2. How is the criminal law policy and criminal responsibility of the perpetrators of the crime of processing petroleum without a permit? Changes in the Oil and Gas Law, especially in the criminal provisions on petroleum, will have a very bad impact on the state and many people who do not feel the results of the processing, where if oil processing is allowed to be carried out illegally, the state will not benefit carrying out the mandate of the 1945 Constitution where by increasing the State Revenue and Expenditure Budget, these funds can be distributed throughout the region or to communities who cannot afford assistance with the budget, if managed by one individual or group then those who enjoy The result of petroleum processing is only for the individual or the group itself, besides that it also has an impact on people who use processed oil that is not according to standards, it can cause damage to vehicles.

Keywords : Criminal Acts, Criminal Liability, Legal Certainty.